

Spiritualisme
PANCASILA

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Spiritualisme PANCASILA

Heri Herdiawanto
Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jumanta Hamdayama

Diterbitkan Atas Kerja Sama



UAI Press

SPIRITUALISME PANCASILA

Edisi Pertama

Copyright © 2018

ISBN 978-602-422-267-3
ISBN (E) 978-602-422-800-2

15 x 23 cm

xx, 288 him

Cetakan ke-3, September 2019

Kencana. 2018.0901

Penulis

Fokky Fuad Wasitaatmadja

Jumanta Hamdayama

Heri Herdiawanto

Desain Sampul

Suwito

Penata Letak

Ria

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23

Rawamangun - Jakarta Timur 13220

Telp: (021) 47864657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pasca tumbanganya Orde Baru sampai saat ini negara dan bangsa kita memiliki segudang persoalan dan berbagai situasi pelik yang menggemaskan. Saat ini, bangsa kita memasuki kondisi dan arena distorsi parah dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Konflik antarsuku, merebaknya kejahatan, konflik elit politik, korupsi yang merajalela dan menggurita, serta perilaku-perilaku lain yang bertentangan dengan kaidah dan norma dasar negara. Distorsi ini kerap menghiasi layar kaca dan berbagai media, baik media dalam maupun luar negeri. Bangsa ini sekarang terkenal sebagai bangsa yang intoleran, bengis, rakus, kejam, tidak humanis dan vandalis. Dahulu, bangsa ini diberi label sebagai bangsa yang santun, toleran, dan beradab.

Dalam konteks kondisi di atas, Orde Reformasi ternyata telah memunculkan dan menumbuhkan kondisi tersebut. Secara politik, kenegaraan reformasi telah berhasil dengan membangun sistem, regulasi, dan format kelembagaan politik yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya, akan tetapi reformasi yang didasari roh liberalisme telah membuat fondasi moralitas, etika, dan mentalitas menjadi rontok. Hal ini ditambah dengan reformasi tanpa didasari *grand design* atau arah yang jelas baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Berbagai persoalan yang menyeruak ke lapangan ini membuat rakyat merindukan kembali sosok Pancasila-ideologi yang selama ini ditinggalkan. Pancasila merupakan ideologi yang dibentuk berdasarkan karakter Indonesia yang multietnis, multigeografi, dan multikultur diharapkan mampu membentengi negara ini dari terpaan nilai-nilai liberalisme yang berkedok globalisasi dan demokratisasi.

Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kembali akan eksistensi dan kukuhnya nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya buku ini diharapkan generasi muda, khususnya, dan

masyarakat Indonesia pada umumnya memperoleh penyegaran kembali tentang Pancasila sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, kemampuan kami sebagai penulis dalam menyajikan materi-materi yang ada dalam buku ini masih banyak kekurangan baik aspek kebahasaan, substansi materi, maupun daftar rujukan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis menunggu kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan isi buku di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga buku ini hadir di tengah pembaca sekarang ini.

Jakarta, Desember 2017

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENDAHULUAN	xi
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA	1
A. Pengertian Ideologi	1
B. Pancasila sebagai Ideologi Nasional	4
C. Pengertian Asal Mula Pancasila	6
D. Bangsa Indonesia Berpancasila dalam Tri Prakara	10
E. Kedudukan dan Fungsi Pancasila	11
F. Pancasila dan Identitas Nasional	17
BAB 2 PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA	35
A. Masa Kerajaan Nasional di Indonesia	35
B. Masa Kerajaan Islam	45
C. Masa Penjajahan Hindia Belanda	50
D. Masa Perjuangan pada Masa Penjajahan	54
E. Masa Pergerakan Kemerdekaan	54
F. Masa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan	64
G. Wawasan Keislaman–Kebangsaan	71
H. Konklusi	99
BAB 3 NILAI SPIRITUALISME DALAM FILSAFAT PANCASILA	101
A. Pengertian Filsafat	101
B. Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat	110
C. Falsafah Pancasila Kontempelasi Spiritualisme	119
BAB 4 HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA	139
A. Sejarah Hak Asasi Manusia	139
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia	144
C. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila	144

	D. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	145
	E. Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999	148
	F. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia	148
	G. Negara Hukum dan Hak Asasi	149
	H. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	150
BAB 5	PANCASILA DAN ETIKA KEHIDUPAN BERNEGARA	155
	A. Pengertian Etika	155
	B. Pengertian Nilai	156
	C. Pengertian Moral	165
	D. Pengertian Norma	166
BAB 6	PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA	169
	A. Pengertian Paradigma	169
	B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan	169
	C. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi	173
	D. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum	175
	E. Pola dan Bentuk Demokrasi Ekonomi Pancasila	179
BAB 7	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI	183
	A. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila	188
	B. Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	189
	C. Pancasila dan Ideologi-ideologi Besar di Dunia	191
BAB 8	PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	209
	A. Latar Belakang	209
	B. Arti dan Makna Proklamasi	216
BAB 9	DEMOKRASI PANCASILA	219
	A. Sejarah Pertumbuhan Demokrasi Pancasila	219
	B. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila	220
BAB 10	PANCASILA DAN AMENDEMEN UUD 1945	229
	A. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945	229
	B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	230
	C. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	232
	D. Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	234



E.	Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dengan Tertib Hukum Indonesia	234
F.	Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945	235
G.	Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Hubungannya dengan Pasal-pasal	239
H.	Tujuan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila	239
I.	Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila	240
J.	Amendemen Undang-Undang Dasar 1945	240
BAB 11	PANCASILA DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN DI INDONESIA	253
A.	Masa Awal Kemerdekaan	254
B.	Periode Konstitusi RIS (1949-1950)	256
C.	Masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950	257
D.	Masa Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)	265
E.	Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)	268
F.	Masa Reformasi (21 Mei 1998- Sekarang)	270
	DAFTAR PUSTAKA	279
	TENTANG PENULIS	285



PENDAHULUAN

Mempelajari Pancasila pada saat ini merupakan bagian dari usaha untuk melestarikan, dan mengamalkannya dari kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar sekali baik itu dari dalam maupun dari luar. Globalisasi yang semakin menggurita di dunia menawarkan berbagai macam gaya hidup yang baru—tatanan yang baru—dan sistem yang baru. Nilai-nilai globalisasi yang memberikan gaya hidup modern, instan, dan hedonis telah menjadi ideologi yang banyak diminati oleh generasi muda. Di lain pihak, justru Pancasila sebagai ideologi negara semakin tergerus oleh perkembangan zaman, dan kurang diminati untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain tantangan yang muncul dari luar yang sangat besar, Pancasila juga mengalami tantangan yang tak kalah kuatnya dari globalisasi. Dinamika masyarakat yang semakin cepat, proses politik yang tanpa arah dan bentuk, pergeseran nilai-nilai di masyarakat bahkan pola sistem yang mulai muncul turut memberikan andil yang besar semakin menjauhkan Pancasila dari generasi muda dan masyarakat Indonesia. Bila hal ini tidak diantisipasi secara cepat dengan resep yang tepat bisa jadi kondisi bangsa dan negara semakin berada dalam pusaran kehancuran. Oleh karena itu, dibutuhkan cara dan langkah yang cepat dalam mengantisipasi ini semua.

Salah satu metode yang ampuh dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan yang berkesinambungan. Melalui pendidikan yang diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi diharapkan generasi muda sekarang memahami arti, nilai-nilai, orientasi, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman mengenai ideologi Pancasila secara lebih mendalam, diharapkan akan menjadikan bangsa yang

1

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

A. PENGERTIAN IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham.

Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Perancis, yakni Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Ideologi merupakan cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Marxisme). Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa atau suatu ras.

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

1. Beberapa Pengertian Ideologi

Pengertian ideologi bermacam-macam dan memiliki sudut pandang sendiri-sendiri di antara para ahli, di antaranya:

- a. Antoine Destutt de Tracy mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia (sama seperti biologi dan zoologi yang

2

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. MASA KERAJAAN NASIONAL DI INDONESIA

Dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, pada awal mendiami wilayah Indonesia hidup berburu dan mengumpulkan makanan (*food gathering*). Mereka hidup berkelompok dan mengembara, karena belum memiliki tempat tinggal tetap. Perkembangan selanjutnya, mereka sudah bisa bercocok tanam dan hidup menetap (*food producing*). Dalam kondisi ini, mereka hidup berdasarkan hubungan kekeluargaan dan selalu menerapkan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan pekerjaan.

Adapun dari segi ras, orang Indonesia berasal dari ras melayu yang datang dan kemudian menyebar mendiami berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Kehadiran mereka telah memberikan dasar pondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kelak. Orang Indonesia memiliki kemiripan dengan orang yang berasal dari dataran Asia, khususnya Asia Tenggara. Persamaan inilah yang menjadi dasar hubungan yang erat antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Nenek moyang kita secara jelas dari zaman dahulu telah menjalani hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan sudah dalam bentuk kerajaan kecil kuno, seperti kerajaan Kutai yang lahir pada abad V di Kalimantan Timur, dengan rajanya yang terkenal Mulawarman. Berikutnya adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memperoleh masa kejayaan pada masanya masing-masing.

1. Kerajaan Sriwijaya (620-1270)

Pada abad VII, muncullah di Sumatra Selatan (Palembang) sebuah

3

NILAI SPIRITUALISME DALAM FILSAFAT PANCASILA

A. PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologis, istilah “filsafat” atau dalam bahasa Inggrisnya “*philosophi*” berasal dari bahasa Yunani “*philosophia*” yang secara lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata *philosophia* tersebut berakar pada kata “*philos*” (*pilia*, cinta) dan “*sophia*” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “*wisdom*” atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filsuf, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Ciri-ciri berpikir filosofis:

- a. Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi.
- b. Berpikir secara sistematis.
- c. Menyusun suatu skema konsepsi.
- d. Menyeluruh.

Empat persoalan yang ingin dipecahkan oleh filsafat, yakni:

- a. Apakah sebenarnya hakikat hidup itu? Pertanyaan ini dipelajari

4

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

A. SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

Awal mula perkembangan hak asasi manusia dimulai pada 1215 dengan munculnya *Magna Charta* (Piagam Agung), yaitu perjuangan di kalangan para bangsawan Inggris yang membatasi kekuasaan Raja John. Demikian pula pada abad ke-17, ketika tidak ada harapan bahwa keadilan dapat diwujudkan, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia berjalan terus. Melalui pergolakan dan perundingan yang lama akhirnya *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak) diterima oleh Raja William III pada 1689. *Bill of Rights* merupakan suatu naskah perundang-undangan yang dihasilkan melalui suatu revolusi tak berdarah (*the Glorious Revolution of 1688*) terhadap Raja James II.

Perjuangan yang serupa juga berlangsung di Perancis dan Amerika Serikat. Dengan gigih rakyat Perancis menentang Raja dinasti Bourbon yang memerintah dengan kekuasaan mutlak. Melalui perjuangan yang dikenal dengan revolusi Perancis (1789) kemudian menghasilkan *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (pernyataan hak asasi manusia dan warga negara). Dalam tahun yang sama, perjuangan rakyat Amerika Serikat berhasil membuahkan *Bill of Rights* yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada 1791.

Timbulnya gagasan mengenai hak ini pada dasarnya merupakan akibat dari perkembangan aliran rasionalisme. Pemikiran ini tercermin dalam karya-karya Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) keduanya dari Inggris dan Montesquieu (1689-1755) serta Rousseau (1712-1778) dari Perancis. Aliran pemikiran yang rasional ini ingin

5

PANCASILA DAN ETIKA KEHIDUPAN BERNEGARA

PENDAHULUAN

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

A. PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar

6

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN PARADIGMA

Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure Of Scientific Revolution*, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoretis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu sosial, manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia.

Dalam masalah yang populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan dan pendidikan.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah "*Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*", hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan

7

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu ideologi yang harus jadi pengawal Negara Republik Indonesia, sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, Pancasila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang tertutup, yang sekali tidak mau menerima penafsiran-penafsiran baru. Apabila hal ini sampai terjadi, maka bagi bangsa dan negara Pancasila harus menjadi sebuah ideologi terbuka. Hanya dengan sikap membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpretasi baru dalam operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamanlah Pancasila akan dapat mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan bangsa dan negara yang senantiasa berkembang dengan cepatnya.

Sebagaimana pada ideologi-ideologi lainnya yang bersikap terbuka, maka selaku ideologi terbuka Pancasila dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas:

1. Dimensi realitas, dalam arti bahwa ideologi Pancasila benar-benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan cara mengagregasikan nilai-nilai luhur yang terdapat ajaran agama dan kebudayaan bangsa. Pancasila benar-benar menampilkan diri sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki dan diyakini oleh bangsa Indonesia.
2. Dimensi Idealisme, dalam arti kualitas idealisme yang tergantung dalam Pancasila mampu menggugah harapan, memberikan optimis dan motivasi kepada para pendukungnya, hingga gagasan

8

PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*, berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga *Dokuritsu Junbi Inkai* dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno–Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah Timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan menemui Jepang, bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sementara itu di Indonesia, pada 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemer-

9

DEMOKRASI PANCASILA

A. SEJARAH PERTUMBUHAN DEMOKRASI PANCASILA

Bahasan mengenai demokrasi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan falsafah Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila diciptakan oleh masyarakat Indonesia dengan ciri-ciri yang masih murni diwarnai oleh watak dan hubungan manusia-masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Watak atau karakter yang bersifat kekeluargaan yakni suatu hubungan hidup yang tercipta dari dalam kelompok manusia yang mengutamakan hubungan batin di antara anggota kelompok masyarakat, oleh karenanya setiap manusia siap berkorban untuk kepentingan manusia lainnya. Watak masyarakat Indonesia seperti ini berbeda dengan watak masyarakat komunal.

Demokrasi Pancasila dengan asas musyawarah mufakat pada hakikatnya merupakan prinsip dan nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila sehingga segala upaya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan demokrasi Pancasila terlebih dahulu harus diawali dengan proses pemahaman dan penghayatan falsafah negara ideologi Pancasila. Secara operasional, demokrasi Pancasila senantiasa dijiwai dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sejarah pertumbuhan demokrasi Pancasila, dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek material dan aspek formal.

1. Aspek Material

Prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah hasil berpikir dan ciptaan manusia-manusia Indonesia yang merupakan bagian

10

PANCASILA DAN AMENDEMENT UUD 1945

A. PENGERTIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pembukaan terdiri atas empat alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968.

Bagian inti adalah batang tubuh yang tersusun atas bab, pasal, ayat serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Batang tubuh terdiri atas dua bagian pokok, yaitu bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara, dan bagian kedua memuat tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Republik Indonesia, serta memuat konsep negara di bidang politik.

Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum isinya mengenai:

1. Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar.
2. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan.
3. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ke dalam pasal-pasalnyanya.
4. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel.
5. Sistem pemerintahan negara.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara

11

PANCASILA DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Dinamika ketatanegaraan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain situasi politik tertentu yang mendorong pemerintahan melakukan perubahan dan/atau penyimpangan terhadap konstitusi negara yang resmi. Selain itu, perubahan nilai dalam negara dapat memengaruhi dinamika ketatanegaraan karena nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar sudah tidak lagi memadai.

Pembahasan mengenai perkembangan dan pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara dan secara lebih khusus Indonesia didasarkan pada konstitusi negara atau UUD 1945. Perubahan konstitusi akan merubah pola dan struktur ketatanegaraan yang ada. Begitu pula perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia diwarnai oleh dinamika yang tajam. Hal ini diakibatkan situasi politik dan kondisinya yang mengharuskan melakukan perubahan untuk mengantisipasi setiap perubahan.

Di bawah ini adalah periode dinamika ketatanegaraan Indonesia dari sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ma'shum. 2009. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen UUD 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Alfian. 1981. *Beberapa Masalah Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Almond. Gabriel dan Sydney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Cipta.
- Aron, Raymond. 1993. *Kebebasan dan Martabat Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Badrika, I Wayan. 2003. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Boisard, Marcel. 1980. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Carey, Peter. 2015. *Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*. Jakarta: Kompas.
- Chaniago, Andrinof. 2001. *Gagalnya Pembangunan Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Darmodihardjo, Darji. 1983. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima.
- Dewanto, Nugroho, (Ed). 2011. *Natsir, Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: KPG-Tempo.
- Frederick, William H dan Soerto Soeri. 2005. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3S.

- Hadad, Ismid (Ed). 1979. *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hamka. 2016. *Angkatan Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2014. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2005. *Dari Hati ke Hati, tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 2016. *Dari Lembah Cita-cita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2015. *Falsafah Hidup, Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan al Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Republika.
- . 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2016. *Kesepaduan Iman dan Amal Saleh*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2016. *Lembaga Budi, Menegakkan Budi, Membangun Jati Diri, Berdasar Tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi*. Jakarta: Republika.
- . 2015. *Lembaga Hidup, Ikhtiar Sepenuh Hati, Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup sesuai Ketentuan Ilahi*. Jakarta: Republika.
- . 1992. *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 2014. *Pribadi Hebat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 1981. *Said Jamaluddin al Afghany*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 2016. *Sejarah Umat Islam, Pra Kenabian hingga Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2003. *Tasauf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Herdiawanto, Heri dan Hamdayama, Jumanta. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kattsoff, Louis O. 2004. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 2015. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kecik, Hario. 2009. *Pemikiran Militer 1, Sepanjang Masa bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Ridwan dan Muhammad Hisyam, *Islam dan Nasionalisme*, tulisan dalam Taufik Abdullah, (Ed). 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia*



- Islam; Jilid 5. Asia Tenggara.* Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa. Silang Budaya, Jaringan Asia.* Buku 2. Jakarta: Gramedia.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah.* Bandung: Penerbit Mizan.
- . 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante.* Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish. 2010. *Islam, Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia.* Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Mahmud Shubhi. 2001. *Filsafat Etika,* Jakarta: Serambi.
- Madjid, Nurcholis, 1991. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan.* Bandung: Mizan.
- Machmud, Amir. 1986. *Pembangunan Politik Negeri Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.
- Mahmud MD. Moh. 1997. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi.* Yogyakarta: Gama Media.
- Makalah-makalah dalam Kongres Pancasila Diselenggarakan oleh UGM-MK RI Tanggal 30, 31 dan 1 Juni di Kampus UGM.
- Majalah *Filsafat Drijarkara,* Th XXII No.3.
- Natsir, Mohammad. 1973. *Capita Selecta.* Jakarta: Bulan Bintang.
- . 2015. *Islam dan Akal Merdeka, Kritik atas Pemikiran Soekarno tentang Islam Sontoloyo dan Seputar Pembaruan Pemikiran Islam Polemik 1934-1940.* Bandung: Segi Arsy.
- . 2014. *Islam sebagai Dasar Negara.* Bandung: Segi Arsy.
- Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila.* Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh.
- Notosusanto, Nugroho. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia.* Jakarta: Depdikbud.
- Nurdin Muhamad, Hendara M. Saragih, dan Imran Husnayan. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII.* Jakarta: Widaya Utama.
- Nugroho, Riant dan Tri Hanurita S. 2005. *Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Oetojo Oesman dan Alfian. 1996. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.* Jakarta: BP-7 Pusat.



- Pakpahan, Muchtar. 2002. *Potret Negara Indonesia*. Jakarta: Bumi Intan Sejahtera.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. *Islam sebagai Pedoman Hidup, Kumpulan Karangan Terpilih*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Rahardjo, Dawam (Ed). 1987. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3S.
- Rochmadi, Nur Wahyu. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Depdiknas.
- Salam, H. Burhanuddin. 1998. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santosa, Kholid O, (Ed). 2006. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pikiran*. Bandung: Segi Arsy.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Setijo, Pandji. 2006. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Subekti, Valina Singka. 2014. *Partai Syarikat Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Simamora, Sahat. 1985. *Pembangunan Politik dalam Perspektif*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat*, Bandung: Darul Falah.
- Suwarno, PJ. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surapto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. T.P.: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sutirto, Tunjung W. 2000. *Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnik Pendatang*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Stiglitz, Josep E. 2007. *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan.
- Soedewo. 2015. *Keesaan Illahi*. Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah.
- Soekarno. 2005. "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme," tulisan *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani.
- . 2013. *Api Sejarah*. Buku 1. Bandung: Salamadani.
- Tri Pranoto, Marimin. 2006. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Cakrawala Maha Karya.



- Tim Cidesindo. 1999. *Membuka Lipatan Sejarah Menguak Fakta Gerakan PKI*. Jakarta: Cidesindo dan Perhimpunan KB-PII.
- Tjokroaminoto, HOS. 2010. *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Segi Arsy.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Waluyo. 2009. *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Wahana, P. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibisono Siswomohardjo Koento. 1989. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka," Makalah pada lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se-Kopertis Wilayah V, Yogyakarta.
- Yahya, Harun. 2004. *Menyingkap Tabir Fasisme*. Bandung: Dzikra.
- Yuniarto. 1967. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada.

Situs Internet

- <http://wikipedia.org>.
- <http://id.shvoong.com/books/mythology-ancient-literature/1946472-sejarah-berdirinya-kerajaan-majapahit/>.
- <http://dot-majapahit.blogspot.com/2010/03/sejarah-kerajaan-majapahit.html>.



TENTANG PENULIS



DR. FOKKY FUAD, lahir di Malang pada 1973. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (1997) dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya Malang. Meraih gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). Saat ini sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). Menjadi Koordinator matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) UAI. Anggota Forum Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan (Fornika). Menjadi peneliti bidang kebijakan pada Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Labkurtannas Lemhannas RI, 2009-2010) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2005). Meraih Predikat Dosen Berprestasi FH Universitas Al-Azhar Indonesia (2012). Pada 2009 mengikuti *shortcourse* pada Japan Patent Office (JPO) dan Kyoto University. Mengikuti *Training of Trainers* Dosen Wawasan Kebangsaan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2014).

Buku lain yang pernah ditulis dan diterbitkan, yaitu: *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). *Budaya Hukum Pedagang Kecil Gina Benteng Kampung Sewan* (FHUI, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi, 2012). *Pancasila, Suatu Tinjauan Historis, Filosofis, dan Hukum*, (Jakarta: Media Hutomo, 2012). *Hukum dalam Dinamika Socio Legal di Indonesia, jilid 1 dan 2*, (T.P. FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2012, edisi Revisi 2014).

Penghargaan Dikti “Insentif Penulisan Buku Ajar” untuk judul *Pancasila, Suatu Analisis, Yuridis, Historis, dan Filosofis*. Penerbit Hartomo Media Pustaka Jakarta. 2011.



JUMANTA HAMDAYAMA, M.Si., dilahirkan di Lemah Abang, 5 Oktober 1980. Menamatkan S-1 Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Universitas Negeri Jakarta pada 2004 dengan predikat kelulusan cum laude. Pada tahun ini pula penulis terpilih sebagai mahasiswa berprestasi I Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kemudian meneruskan studi di program pasca sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan selesai pada 2007. Sejak mahasiswa sudah aktif di berbagai macam organisasi baik intra maupun ekstra kampus seperti BEM, BPM, LKM, dan HMI. Dunia pendidikan sudah digeluti sejak masih duduk di bangku perkuliahan dengan mengajar di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Adapun mata pelajaran atau matakuliah yang dipegang adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Tata Negara dan Pendidikan Pancasila dan Pemantapan Kemampuan Mengajar, Pemantapan Kemampuan Profesional, Pembelajaran Kelas Rangkap.

Karya tulis yang sudah dihasilkan di antaranya adalah “Peranan Wanita dalam Partai Politik” (Skripsi: 2004), “Konflik dan Kekerasan Politik dalam Pilkada Langsung” (Tesis: 2007), “Tingkat Partisipasi Politik Pelajar dalam Pemilu 2009” (Proyek Penelitian), *Pancasila Suatu Telaah Yuridis, Historis, dan Filosofis* (Hartomo Media: 2012), *Cerdas Kritis dan Aktif Berwarga Negara* (Erlangga: 2010), *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter* (Ghalia: 2014), akan terbit *Metodologi Pengajaran* (Bumi Aksara: 2015), serta puluhan artikel dan makalah yang dipublikasikan maupun yang diseminarkan. Selain aktif mengajar, penulis juga sering menjadi peserta dan pembicara dalam berbagai pelatihan. Untuk bisa berkomunikasi dengan penulis silakan kirim ke email jumantahamdayama@yahoo.com.



HERI HERDIAWANTO, M.Si., *on going* Program Doktor Universitas Indonesia, meraih gelar Master dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI tahun 2006), dengan tercatat sebagai mahasiswa lulus tercepat diangkatannya. Lahir di Kuningan, 14 Februari 1973. Semasa mahasiswa dikenal sebagai; Aktivistis intra dan ekstra kampus seperti Kordinator lapangan gerakan MaHaSisWa Mei 1998, Inisiator Forum



Diskusi Pasca Sarjana UI Salemba 2005, dan Ketua Umum Lapenmi HMI Cabang Jakarta 1995-1997. Tercatat juga sebagai pengurus Nasional MASIKA ICMI 2009. Kemudian menjadi pembicara di forum-forum ormas kepemudaan dan kemahasiswaan sejak 1996, misalnya Teknik Tata Cara Bersidang dan metode diskusi. Saat mahasiswa memenangkan lomba diskusi tingkat nasional P2P4 sebagai utusan DKI Jakarta dan Raja Kampus 1995. Saat ini sebagai dosen tetap di program studi Hubungan Internasional dengan mengajar matakuliah *Pengantar Ilmu Politik, Dasar Logika, Militer dan Politik, Ide-ide politik Barat, Manajemen Komunikasi Lintas Budaya juga (MKU) Matakuliah Umum Pkn dan JK.3* di Universitas Al-Azhar Indonesia sejak tahun 2006, serta aktif di lembaga riset dan pendidikan YPI Al Azhar sejak 1999. Pendamping festival kebudayaan di Yalova, Cinarcyk, Istambul (Turki), Orly, Paris (Perancis), Brussel (Belgia), dan Volendam (Belanda tahun 2005). Perjalanan Internasional lainnya (Arab Saudi, Sarjah, ABuddhabi tahun 2007), Brunei, Singapura, (2010-2013). Alamat penulis di Ciputat-Tangsel, Banten. Email: heriherdiawanto@yahoo.co.id/08128729173.

- Penghargaan Dikti untuk buku *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Erlangga, 2010).
- Finalis National Program Inovasi Citi Succes Fund 2004. Tentang Tema “Berbeda Itu Indah”.



